

**PENEGAKAN HUKUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM
OPERASI YUSTISI PENANGGULANGAN TUNA SUSILA MENURUT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 2017
DALAM PERSPEKTIF *SIYĀSAH TANFĪDZIYYAH***

SKRIPSI

Oleh:

Cininta Kareena Dewi

05020421033



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cinintha Kareena Dewi

NIM : 05020421033

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul : Tinjauan Fiqh Siyāsah Tanfidziyyah Terhadap Kinerja Satpol PP Dalam Operasi Yustisi Penanggulangan Tuna Susila Menurut Perda Kabupaten Kediri No. 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis yang saya buat sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya milik orang lain dan sudah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Surabaya, 14 April 2025
Saya yang Menyatakan,



Cinintha Kareena Dewi
05020421033

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Cinintha Kareena Dewi
NIM. : 05020421033
Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Kinerja
Satpol PP Dalam Operasi Yustisi Penanggulangan Tuna
Susila Menurut Perda Kabupaten Kediri No. 6 Tahun
2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 14 April 2025

Pembimbing,



H. AH. Fajruddin Fatwa S.H., M.H.I

NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Cinintha Kareena Dewi

NIM : 05020421033

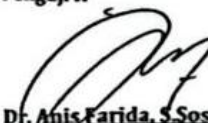
Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Hari Rabu Tanggal 23 April 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

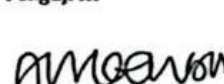
Penguji I


H. A.H. Fajruddin Fatwa, S.H., M.H.I.
NIP. 197606132003121002

Penguji II


Dr. Anis Farida, S.Sos. S.H., M.Si
NIP. 197208062014112001

Penguji III


A. Mufti Khazin, M.H.I
NIP. 197303132009011004

Penguji IV


Ibnu Mardiyanto, M.H
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 23 April 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,


Dr. Hj. Soqiyah Mufarrah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Cinintha Kareena Dewi.....
NIM : 05020421033.....
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum.....
E-mail address : kadecinintha@gmail.com.....

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Operasi Yustisi Penanggulangan Tuna Susila Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 Dalam Perspektif

Siyāsah Tanfidziyyah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Juli 2025

Penulis

Cinintha Kareena Dewi

ABSTRAK

Ketertiban umum adalah sebuah aspek penting dalam menciptakan lingkungan bermasyarakat yang aman dan damai. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran utama dalam menegakkan Peraturan Daerah, termasuk dalam pelaksanaan operasi yustisi penanggulangan tuna susila yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai meningkatnya jumlah tuna susila di Kabupaten Kediri dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut terjadi dalam total 9 tempat Eks lokalisasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Kediri. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: *pertama*, bagaimana penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan operasi yustisi penanggulangan tuna susila menurut Perda Kabupaten Kediri No. 6 Tahun 2017; *kedua*, bagaimana perspektif *Siyāsah Tanfidziyyah* terhadap penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan operasi yustisi penanggulangan tuna susila menurut Perda Kabupaten Kediri No. 6 Tahun 2017.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan hukum *sosiolegal studies* yang menghubungkan teori hukum dengan data empiris untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang praktik hukum dalam masyarakat. Penelitian ini berorientasi pada perolehan data langsung di lapangan dengan menggunakan sifat deskriptif-analitis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori *siyāsah tanfidziyyah* untuk menganalisis fakta-fakta dan temuan yang telah diperoleh.

Penelitian ini menemukan hasil bahwa kinerja Satpol PP telah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur dan ketentuan dari Perda yang mengatur, namun ada beberapa kendala yang menghambat keefektifitasan operasi yang dijalankan berdasarkan kelima faktor dari teori penegakan hukum, yakni faktor perundang-undangannya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kebudayaan dan faktor masyarakat. Perbuatan asusila adalah hal yang menimbulkan kemudhorotan, maka dibutuhkan penertiban dan pengamanan seperti yang ditegakkan oleh Wilāyatul Hisbah di Aceh untuk mengoptimalkan pelaksanaan operasi yustisi penanggulangan tuna susila di Kabupaten Kediri.

Sejalan dengan hasil penelitian yang telah disebutkan bahwa Satpol PP memiliki dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan tugasnya, namun masih tetap diperlukan penyempurnaan dalam implementasinya. Maka saran yang diberikan penulis dari beberapa hal tersebut adalah: 1. Pemberian sanksi hukum pada Perda yang mengatur dan pembuatan instrumen penutupan lokalisasi; 2. Penambahan personil Satpol PP; 3. Jumlah mobilitas dan anggaran yang ditingkatkan; 4. Mengadakan pembinaan dan edukasi untuk kesadaran masyarakat. Keempat hal tersebut dapat menjadi evaluasi bagi Satpol PP untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih baik, adil, dan solutif bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	I
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	II
PENGESAHAN.....	IV
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI.....	V
KATA PENGANTAR.....	VI
ABSTRAK.....	VIII
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR TABEL.....	XII
DAFTAR GRAFIK.....	VIII
DAFTAR TRANSLITERASI.....	IX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis penelitian.....	19
2. Pendekatan penelitian.....	19
3. Data.....	20
4. Sumber data.....	21
5. Teknik pengumpulan data.....	22
6. Teknik pengolahan data.....	24
7. Teknik analisis data.....	25

I. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL FIKIH SIYĀSAH TANFĪDZIYYAH DAN TEORI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM OLEH SATPOL PP DALAM PELAKSANAAN OPERASI YUSTISI PENANGGULANGAN TUNA SUSILA	
A. Tinjauan Teoritis Fikih <i>Siyāсах Tanfīdziyyah</i>	28
1. Pengertian fikih siyāсах	28
2. Ruang lingkup kajian fikih siyāсах	29
3. Siyāсах tanfīdziyyah	31
4. Wilāyatul Hisbah	32
B. Teori Penegakan Hukum	37
C. Teori Sistem Hukum	40
BAB III SATPOL PP DALAM OPERASI YUSTISI PENANGGULANGAN TUNA SUSILA	
A. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri	43
1. Kondisi Geografis dan Demografis Wilayah Penegakan Hukum Satpol PP Kabupaten Kediri	43
2. Struktur Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah Operasi Yustisi Penanggulangan Tuna Susila	45
B. Peran Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017	49
1. Tugas, Wewenang dan Peran Satpol PP dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017	49
C. Operasi Yustisi dalam Penanggulangan Tuna Susila	52
1. Pengertian dan Tujuan Operasi Yustisi	52
2. Mekanisme Operasi Yustisi	58
3. Tantangan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Operasi Yustisi	65
BAB IV ANALISIS PENEGAKAN HUKUM OLEH SATPOL PP DALAM OPERASI YUSTISI PENANGGULANGAN TUNA SUSILA PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFĪDZIYYAH	
A. Analisis <i>Siyāсах Tanfīdziyyah</i> dalam Konsep Wilāyatul Hisbah Terhadap	

Penegakan Hukum Oleh Satpol PP Kabupaten Kediri.....	73
1. Korelasi Penegakan Hukum Satpol PP dengan <i>Siyāsah Tanfīdziyyah</i>	73
2. Implementasi <i>Siyāsah Tanfīdziyyah</i> dalam Penegakan Hukum Oleh Satpol PP	74
3. Wilāyatul Hisbah dalam Konteks Penegakan Ketertiban Umum	80
4. Perbandingan antara Satpol PP dan Wilāyatul Hisbah dalam Sejarah Islam ...	81
5. Relevansi Wilāyatul Hisbah dalam Operasi Yustisi Penanggulangan Tuna Susila	82
6. Potensi Penerapan Prinsip Wilāyatul Hisbah dalam Meningkatkan Efektivitas Operasi Yustisi	84
B. Implikasi Hukum dan Sosial Operasi Yustisi	87
1. Dampak Pelaksanaan Operasi Yustisi	87
2. Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Berbasis Fikih <i>Siyāsah Tanfīdziyyah</i> dalam Konsep Wilāyatul Hisbah	90
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	98

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

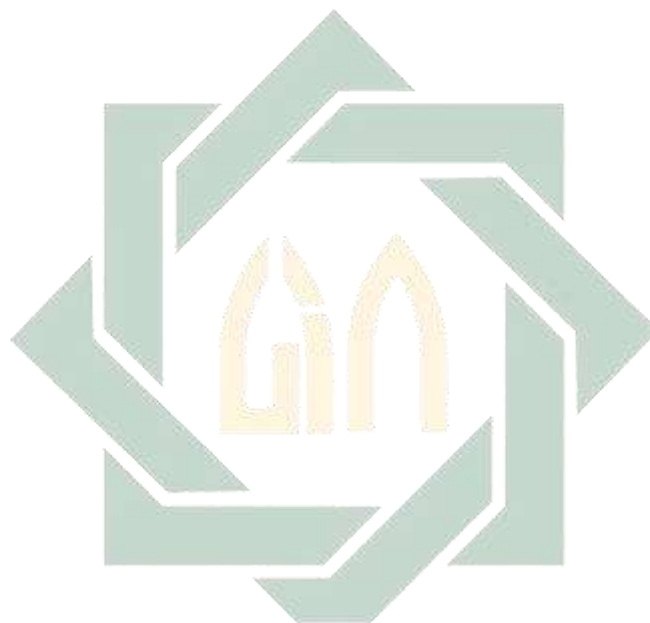
DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Kediri.....	42
Tabel 3.2 Data Jumlah Anggota Satpol PP PNS Kabupaten Kediri.....	45
Tabel 3.3 Data Jumlah Anggota Satpol PP Non PNS Bidang PPUD Kabupaten Kediri.....	46
Tabel 3.4 Data Jumlah Kendaraan Operasional Satpol PP Kabupaten Kediri.....	47
Tabel 3.5 Rekapitulasi Data WPS dan Wisma di Eks lokasi Kabupaten Kediri Tahun 2019-2024.....	49
Tabel 3.6 Sidang Tindak Pidana Ringan Asusila Tahun 2020.....	58
Tabel 3.7 Sidang Tindak Pidana Ringan Asusila Tahun 2021.....	60
Tabel 3.8 Sidang Tindak Pidana Ringan Asusila Tahun 2022.....	61

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Data WPS Yang Terkonfirmasi Beberapa Tahun Terakhir Di 9 Eks lokalisasi.....	5
Grafik 3.1 Jumlah Data Sidang Tipiring Kasus Asusila.....	63



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jafar, Wahyu. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2018.
- Abdullah, Asnawi, dan Safriadi Safriadi. "Otoritas Wilayatul Hisbah dalam Pemerintahan: (Suatu Kajian terhadap Penegakan dan Pengawasan Hukum Islam di Aceh)." *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi* 11, no. 1 (15 Juni 2022): 55–70. <https://doi.org/10.47766/syarah.v1i1.477>.
- Abraham, Yusuf. "Penegakan Hukum Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid 19 Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Di Kabupaten Kediri (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri)." Universitas Islam Kediri, t.t.
- adminlp2m. "Rencana Pengumpulan Data: Apa Itu Dan Cara Melakukannya." *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* (blog), 31 Desember 2022. <https://lp2m.uma.ac.id/2022/12/31/rencana-pengumpulan-data-apa-itu-dan-cara-melakukannya/>.
- Aji, Difta Wahyu. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Vandalisme Di Kabupaten Klaten." Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Amri, Rizal Khairul. "Pelaksanaan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Blora (Studi Kasus Perda No. 7 Tahun 2015)" 6, no. 2, hlm. 411–420 (Maret 2017): 22.
- Amri, Syaiful. "Fiqh Siyasah." UIN Sumatera Utara, 2023.
- Cloudeka, Lintasarta. "Pengolahan Data: Pengertian, Fungsi, Tahapan, dan Outputnya." *Lintasarta* (blog), 26 Juni 2023. <https://www.cloudeka.id/id/berita/cloud/pengolahan-data-adalah/>.
- Damanik, Anita Milenia Sari. "(Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang)," no. 02 (2018).
- Darmawan. "Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Gresik." *Airlangga Development Journal* 2, no. 1 (2 Agustus 2019): 21. <https://doi.org/10.20473/adj.v2i1.18025>.
- Fajar Solin, Rizky. "Efektivitas Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Qanun Aceh (Perspektif Masyarakat Desa Belegen mulia, Kota Subulussalam Propinsi Nanggro Aceh Darussalam)." UIN Sumatera Utara, 2018.
- Halim, Marah, S Ag, dan M Ag. "EKSISTENSI WILAYATUL HISBAH," no. 2 (2011).
- Hamid, Abdul. "Peran Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Perekonomian Islam." *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 2 (1 Desember 2020): 101–12. <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i2.2103>.
- Lailatin Nafisah, Ummahatul. "Pengertian Fiqh Siyasah dan Ruang Lingkupnya."

Nafisa's Archive Knowledge, 2022, 9.

Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.

Ma, Ma'had Aly Raudhatul. "Konsep Wilayahul Hisbah Menurut Imam Al Mawardi" 2, no. 1 (2024).

Mushawwir dan Abdil, Ahmad Dzikri. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi nomor 7 tahun 2015 : Studi kasus larangan minimal beralkohol di Kabupaten Sukabumi." UIN Sunan Gunung Djati, 2021.

Noor, Afif. "Socio-Legal Research: Integration of Normative and Empirical Juridical Research in Legal Research." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 27 April 2023.

Panjaitan, Jefri S. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Dikota Medan Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) (Studi kasus wilayah simpang selayang kecamatan medan tuntungan)." UNIVERSITAS MEDAN AREA, 2022.

Pemerintah Kabupaten Kediri. *Kabupaten Kediri dalam Angka Tahun 2021*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, 2021.

Rahman, Muhammad Ikhsan. "Penertiban Penyakit Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau (Studi Kasus Prostitusi)." IPDN, 2024. <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/16558>.

Rakhmawati, Antin. "IMPLEMENTASI LEMBAGA HISBAH DALAM MENINGKATKAN BISNIS ISLAM" 7 (2016).

Rasyid. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Satpol Pp Dalam Menertibkan Penjualan Miras Di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE, 2022.

Ratno, Anggito. "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomer 3 Tahun 2021 Terkait Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Pelanggaran Masyarakat di Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang Kel.Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)." UIN Raden Intan, 2023.

Republik Indonesia. "Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja." Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2018.

Rokhmadi, Rokhmadi. "Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam." *At-Taqaddum* 7, no. 2 (6 Februari 2017): 311. <https://doi.org/10.21580/at.v7i2.1209>.

Sitohang, Dahlan, dan Richard Jhan Narpadie. "Peran Satpol PP dalam Penegakan Tentang Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila di Kabupaten

Sukoharjo.” *Mutiara : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 1 (3 Januari 2024): 69–79. <https://doi.org/10.61404/jimi.v2i1.94>.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Sudjana, Nana, dan Awal Kusuma. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Alnesindo, t.t.

Syuaib, Moh Rusli. “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kabupaten Tojo Una-Una,” 2015.

Wahdaniyah. “Analisis Siyasah Tanfidziyah Terhadap Efektivitas Perpres Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Pinrang.” IAIN Parepare, 2024.

Wicaksono, Aprilio. “Penanganan Dinas Sosial Terhadap Mantan Pekerja Seks Komersial (PSK) Dari Eks Lokalisasi Semampir Kediri Yang Terdampak Oleh Pelaksanaan Perda Kotamadya Derah Tingkat II Kediri Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemberantasan Pelacuran Dalam Daerah Kotamadya Kediri Ditinjau Menurut Hukum Islam.” UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2018.

Yuliza, Rina. “(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan),” 2015.

———. “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.” UIN Raden Intan, 2023.

Yusuf, Muhammad, dan A Zahid. “Hidden Localization (Case Study of Function Modification of the Former Gedangsewu Localization in Pare Subdistrict, Kediri District)” 3 (2023).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum.